

# **KEBIJAKAN KEPALA SMP NEGERI 1 AIMAS DALAM IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU BERBASIS SEKOLAH (MPMBS)**

**Wisnu Wardoyo**

Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Indonesia

Corespondensi author email: [wisnuwardoyo@unimudasorong.ac.id](mailto:wisnuwardoyo@unimudasorong.ac.id)

**Rustamadji**

Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Indonesia

[rustamadji@unimudasorong.ac.id](mailto:rustamadji@unimudasorong.ac.id)

## **Abstract**

*This study assessed the principal's competence in implementing School-Based Quality Improvement Management (Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, or MPMBS) using qualitative methods, focusing on the MPMBS Program's execution. Participants included the principal, vice principal, teachers, administrative staff, students, and the school committee. Data were gathered through interviews, documentation, and observation. The principal's implementation of MPMBS comprised several aspects: 1.) ensuring the teaching and learning process meets customer satisfaction, 2.) planning school programs to align with cultural demands and student needs, 3.) managing the curriculum through planning, organizing, implementing, and evaluating, 4.) handling human resources by developing, compensating, and motivating personnel, 5.) managing equipment and supplies to provide optimal learning facilities, 6.) overseeing finances transparently, 7.) delivering student services from entry to exit, 8.) fostering school-community relations through cooperation, and 9.) managing the school climate to create a conducive environment. Recommendations suggest the Sorong Regency Education and Culture Office should further encourage schools to empower the implementation of School-Based Quality Improvement Management.*

**Keywords:** Policy of the principal, MPMBS, Quality.

## **Abstrak**

Penelitian bertujuan mengetahui kemampuan kepala sekolah dalam implementasi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah dengan pendekatan kualitatif studi pelaksanaan program. Informan penelitian meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, karyawan tata usaha, siswa, dan komite. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian bahwa implementasi MPMBS meliputi 1)PBM diorientasikan untuk memuaskan pelanggan; 2)Perencanaan program sekolah dinilai kesesuaian antara program dengan tuntutan kebutuhan murid; 3)Pengelolaan kurikulum melalui melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi; 4)Pengelolaan ketenagaan dengan mengembangkan, menggaji, memotivasi personil, membantu anggota mencapai posisi dan standar perilaku, memaksimalkan

perkembangan karier tenaga kependidikan, serta menyelaraskan tujuan individu dan organisasi sesuai kontek MBS; 5) Pengelolaan peralatan perlengkapan mengupayakan fasilitas belajar yang memadai, relevan dengan kebutuhan serta dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran; 6) Pengelolaan Keuangan dengan merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah; 7) Pelayanan siswa menerapkan pengaturan kegiatan berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai keluar; 8) Hubungan sekolah-masyarakat dengan menjalin kerjasama, sehingga berperan membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik; 9) Pengelolaan iklim sekolah mendukung terwujudnya sekolah yang harmonis dan kondusif. Berdasarkan simpulan tersebut direkomendasikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong untuk lebih memotivasi pemberdayaan sekolah-sekolah dalam implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah.

**Kata Kunci :** Kebijakan Kepala Sekolah, MPMBS dan Mutu.

## PENDAHULUAN

Pendidikan Nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, berkepribadian, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas, dan terampil serta sehat jasmani dan rohani, juga mampu menumbuhkan dan memperdalam cinta tanah air, mempertebal semangat kebangsaan dan rasa kesetiakawanan sosial.

Salah satu strategi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia adalah melalui peningkatan mutu pendidikan. Sejalan tuntutan ketrampilan abad 21, diperlukan profesionalisme di segala bidang termasuk dunia pendidikan. Dalam bidang pendidikan, Indonesia dewasa ini paling sedikit menghadapi tiga persoalan yang serius. *Pertama*, krisis moral yang begitu dahsyat di dalam masyarakat. *Kedua*, sistem pembelajaran yang belum begitu memadai di sekolah-sekolah. *Ketiga*, mutu pendidikan yang masih rendah khususnya di jenjang pendidikan dasar dan menengah (Sindhunata, 2001:1). Namun demikian pemerintah beserta berbagai kalangan telah dan terus menerus berupaya mewujudkan peningkatan mutu pendidikan, antara lain melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana-prasarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan buku dan alat pelajaran, pelatihan dan peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan lainnya, serta peningkatan manajemen sekolah. Meski semua itu belum mampu menunjukkan peningkatan kualitas yang berarti, terutama sekolah-sekolah di kawasan tertentu atau daerah tertinggal (Rachmadana et al. 2021).

Sedikitnya terdapat tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan yang merata, (Depdiknas, 2002:1). Faktor tersebut adalah: Pertama, banyak kalangan berasumsi bahwa sekolah apabila in-put nya baik akan

menghasilkan out-put yang baik pula. Sehingga cenderung mengabaikan proses, padahal proses pendidikan turut menentukan out-put pendidikan. Kedua, penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratik- sentralistik sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggaraan pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang kadang-kadang kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Sekolah kehilangan kemandirian, keluwesan, motivasi, kreatifitas/inisiatif untuk memajukan dan mengembangkan lembaganya termasuk peningkatan mutu sekolah. Ketiga, kurangnya peran serta warga sekolah (guru) dan warga masyarakat (orang tua siswa) dalam menyelenggarakan pendidikan dewasa ini. Partisipasi guru dalam pengambilan keputusan sering diabaikan, padahal terjadi tidaknya perubahan di sekolah sangat tergantung pada guru. Partisipasi masyarakat dewasa ini umumnya dikaitkan pada dukungan dana, sedangkan dukungan lainnya yang berupa moral, pemikiran, barang dan jasa kurang diperhatikan. Akuntabilitas sekolah terhadap masyarakat juga lemah terutama mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan pendidikan kepada masyarakat (orang tua) sebagai *stakeholder*.

SMP Negeri 1 Sorong adalah salah satu dari 47 SMP di Kabupaten Sorong, yang menyelenggarakan pendidikan sejak tahun 2014 dengan NPSN. 60401361, dengan SK Pendirian Sekolah : 421.3/141/TAHUN 2014 tanggal SK Pendirian 02 April 2014. Alamat sekolah jalan Klamono Km. 19 Aimas Kabupaten Sorong.

Adapun profil sekolah SMP Negeri 1 Sorong adalah sebagai berikut :

Nama Sekolah	; SMP Negeri 1 Distrik Aimas
Kabupaten	: Sorong
Propinsi	: Papua Barat Daya
Nama Kepala Sekolah	: Yehuda Masumbauw, S.Pd.,M.M.Pd.
NIP.	: 19650704 198812 1 002

- a. Jumlah siswa pada SMPN 1 Sorong pada tahun 2022/2023, sejumlah untuk anak laki-laki 457, dan siswa perempuan 470, dengan jumlah rombongan belajar 26.
- b. Jumlah ruang siswa pada SMPN 1 Sorong pada tahun 2022/2023 sejumlah untuk kelas 1 : 9 ruang, kelas 2:9 ruang dan kelas 3:8 ruang.
- c. Pengurus Komite Sekolah sebanyak 8 orang, terdiri dari unsur tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, orang tua murid, pengusaha, ulama dan unsur masyarakat.

Pelaksanaan proses pendidikan di SMP Negeri 1 Sorong ini melibatkan 54 guru. Sekitar 100% guru berlatar belakang pendidikan Sarjana.

Fokus Penelitian adalah: Kemampuan kepala sekolah terkait dengan keseluruhan dimensi sistem pendidikan di sekolah yang meliputi masukan pendidikan, proses pendidikan dan keluaran pendidikan yang meliputi : 1) Proses Belajar Mengajar; 2). Perencanaan Program Sekolah; 3). Pengelolaan Kurikulum; 4). Pengelolaan

Ketenagaan; 5). Pengelolaan Peralatan dan Perlengkapan; 6). Pengelolaan Keuangan; 7). Pelayanan Siswa; 8) Hubungan Sekolah Masyarakat; 9). Pengelolaan Iklim Sekolah Selanjutnya penulis merumuskan pokok masalah adalah : Bagaimanakah kemampuan kepala sekolah SMP Negeri 1 Sorong dalam mengimplementasikan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS).

Dari rumusan masalah tersebut diperinci ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut: Sejauh manakah kemampuan kepala sekolah dalam mengimplementasikan MPMBS atau Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah?

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskripsi kualitatif. yaitu (1) dilakukan pada latar alami, merupakan alat penting adalah adanya data yang langsung dari peneliti sendiri. (2) Bersifat deskriptif yaitu data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata atau gambar. (3) Lebih memperhatikan proses dari hasil. (4) Dalam menganalisis data cenderung induktif, dan (5) Makna merupakan hal yang esensial.

Pendekatan kualitatif untuk mengkaji permasalahan dan memperoleh makna yang lebih mendalam sesuai kondisi lingkungan, dengan pertimbangan:

- 1) Peneliti bermaksud mengembangkan konsep pemikiran, pemahaman atas pola yang terkandung dalam data, melihat secara keseluruhan suatu keadaan, proses, individu dan kelompok dan mendeskripsikan secara induktif naturalistik.
- 2) Peneliti bermaksud untuk menganalisis dan menafsirkan suatu fakta, gejala dan peristiwa yang berkaitan dengan kemampuan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan dalam konteks ruang, waktu dan situasi sebagaimana adanya.
- 3) Bidang kajian penelitian ini berkenaan dengan proses dan aktifitas pencapaian tujuan kelembagaan, yang didalamnya terjadi suatu interaksi aktifitas diantara berbagai komponen pendidikan.

Adapun subjek penelitian ini terdiri dari mereka yang memiliki beragam karakteristik, unsur dan nilai-nilai yang berkaitan dengan aspek-aspek pokok penelitian ini. Subjek yang dimaksud terdiri atas kepala sekolah, guru, murid, komite sekolah, orang tua murid, dan segenap *stake holders* lainnya.

Teknik pengumpulan data menggunakan tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

### **1. Observasi**

Digunakan untuk memungkinkan perolehan informasi dari tangan pertama mengenai masalah yang diteliti dan kondisi-kondisi yang mendorong munculnya masalah itu. Dengan melakukan pengamatan dengan tingkatan partisipasi aktif dan pasif secara bergantian, dengan memperhatikan sifat situasi dan peristiwa yang terjadi di lapangan sebagai tempat keterlibatan peneliti

dengan responden. Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat melakukan pendekatan terhadap semua responden dalam suasana persahabatan dan tidak mengganggu proses kegiatan yang biasa dilakukan oleh responden.

## 2. Wawancara

Salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian, kegiatan wawancara ini dilakukan secara terus menerus dengan responden dalam berbagai situasi sesuai kebutuhan.

## 3. Studi Dokumentasi. Pengumpulan data juga menggunakan studi dokumentasi, sebagai sumber data yang dapat dijadikan bahan triangulasi untuk melakukan pengecekan kesuaian data.

### **Sumber Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokan menjadi dua, yaitu data utama data pendukung. Data utama diperoleh dari informan, yaitu orang-orang yang terlibat langsung dalam kegiatan sebagai fokus penelitian. Yang terlibat sebagai informan dalam penelitian ini adalah: Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, siswa dan orang tua siswa di SMP Negeri 1 Sorong.

Sedangkan data pendukung bersumber dari dokumen-dokumen resmi yang ada di SMP Negeri 1 Sorong Kota Sorong berupa catatan. Data utama berupa kata-kata atau ucapan dan perilaku orang yang diamati dan diwawancarai, sedangkan data pendukung berwujud non manusia.

### **Analisa Data**

Analisa data dilakukan sejak awal dan sepanjang proses penelitian berlangsung. Teknik Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif dari Miles dan Huberman dengan tiga prosedur yaitu : (1) Reduksi data, dilakukan dengan cara memilih data yang sudah disusun dalam laporan, dengan cara menyusun kembali dalam bentuk uraian atau laporan yang lebih terinci, selanjutnya laporan yang direduksi dirangkum dan dipilih berdasarkan hal-hal pokok serta difokuskan pada fokus penelitian ; (2) Penyajian data diperoleh dari data mentah kemudian diubah menjadi data yang sistematis sesuai dengan apa yang diteliti; (3) Penarikan simpulan/verifikasi yaitu setelah menyusun laporan yang menggambarkan seluruh proses penelitian sejak prasurvei, penyusunan desain penelitian, pengolahan data , penafsiran data. Kisi-kisi Instrumen Kebijakan Kepala Sekolah dalam Implementasi MBPS:

No	Variabel	Sub Variabel	Keterangan
1	Proses pembelajaran	1. Menetapkan tujuan pembelajaran	Dokumentasi
		2. Menyusun program semester	Dokumentasi
		3. Menentukan langkah-langkah mengajar	Wawancara
		4. Merencanakan program evaluasi	Wawancara
2.	Perencanaan Program Sekolah	1. Merencanakan program peningkatan mutu secara terbuka dan melibatkan seluruh unsur sekolah	Dokumentasi
		2. Merencanakan analisis kebutuhan untuk meningkatkan mutu sekolah	Dokumentasi
		3. Merencanakan prioritas peningkatan Mutu	Dokumentasi
		4. Melakukan evaluasi proses pelaksanaan program dan hasil	Wawancara
		5. Melakukan advokasi, demokratisasi, publikasi, komunikasi, sosialisasi program	Observasi
3	Pengelolaan Kurikulum	1. Merencanakan, melaksanakan dan menilai program pengajaran.	Observasi
		2. Melakukan penjabaran isi kurikulum	Observasi
		3. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaannya	Wawancara
		4. Perencanaan Analisis kebutuhan	Dokumentasi
4	Pengelolaan ketenagaan	1. Perencanaan Analisis kebutuhan	Dokumentasi
		2. Memberikan wawasan kepada bawahan melalui kegiatan diskusi, rapat-rapat, dan pembinaan.	Observasi; Wawancara
		3. Mengembangkan kapasitas sumberdaya manusia / Pengembangan profesionalisme ketenagaan melalui kegiatan penataran, pendidikan dan pelatihan.	Observasi; Wawancara
		4. Memberikan bimbingan dan arahan kepada staf dalam melaksanakan program kegiatan/tugas.	Observasi; Wawancara

		5. Pemberian hadiah dan sangsi	Observasi; Wawancara
5	Pengelolaan fasilitas (peralatan dan perlengkapan)	1. Merencanakan, mengadakan, pengawasan, penyimpanan inventarisasi dan penghapusan serta penataan.	Observasi, Dokumentasi, Wawancara
		2. Menyediakan fasilitas yang menunjang proses belajar mengajar agar optimal	Dokumentasi, Observasi
6	Pengelolaan keuangan	1. Mencari sumber keuangan dan pembiayaan untuk sekolah Menghimpun atau menggalang dana sekolah melalui rencana kerja dan menjualnya kepada masyarakat untuk memperoleh dukungan dana.	Observasi; Wawancara
		2. Melaksanakan penyusunan rencana anggaran peningkatan mutu sekolah melalui RAPBS secara terbuka dan melibatkan seluruh unsur sekolah.	Dokumentasi; observasi
		3. Menggunakan dana sekolah secara terbuka kepada warga sekolah	Wawancara; Observasi
		4. Melakukan audit terhadap penggunaan dana dan hasilnya dilaporkan kepada birokrasi/ <i>stakeholders</i> .	Observasi; wawancara
7	Pengelolaan pelayanan Siswa	1. Menetapkan tujuan	Dokumentasi
		2. Menetapkan langkah guna mewujudkan tujuan kemana siswa akan di bawa	Dokumentasi
		3. Menjabarkan tanggung jawab sekolah terhadap siswa	Wawancara;Observasi
		4. Melaksanakan pelaporan tentang pencapaian tujuan sekolah.	Dokumentasi; Wawancara
8		1. menetapkan tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat	Dokumentasi; observasi

	Pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat	2. Menjalin hubungan baik antara sekolah dan masyarakat  3. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan, keuangan, kepegawaian, dan sarana prasarana sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik atau birokrasi.	Wawancara; observasi  Dokumentasi; observasi
9	Pengelolaan Iklim sekolah	1. Membuat strategi untuk menciptakan iklim sekolah yang kondusif  2. Membuka komunikasi di sekolah agar stakeholder dapat menyalurkan aspirasinya (temu wicara, pertemuan, konsulatasi, dan rapat-rapat)	Observasi; Wawancara  Wawancara

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Konsekuensi logis dari perubahan penyelenggaraan pendidikan, yaitu dari pola manajemen lama (sentralistik) menuju pola manajemen baru (desentralistik), maka tugas dan jajaran birokrasi juga harus diubah. Konsep MBS bahwa pola manajemen baru lebih menekankan pada pemandirian dan pemberdayaan sekolah, sekolah merupakan unit utama kegiatan pendidikan, sedangkan birokrasi dan unsur-unsur lainnya merupakan unit pelayanan pendukung sekolah.

Tugas dan fungsi utama sekolah adalah mengelola penyelenggaraan MBS di sekolah masing-masing, maka sekolah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang berfungsi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) pendidikan jalur sekolah. Secara garis besar hasil penelitian mengungkap, yaitu kemampuan kepala sekolah dalam implementasi MPMBS terkait dengan :

### **A. Proses Belajar Mengajar**

Agar proses belajar mengajar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien terkait dengan peningkatan mutu pendidikan, kepala sekolah membentuk kelompok diskusi atau kelompok bimbingan belajar terutama dalam menghadapi ujian semester dan ujian lainnya. Hal ini guna melakukan pendalaman materi-materi ujian yang dilakukan di luar jam pelajaran dengan melibatkan semua guru. Kelompok belajar terbimbing dilakukan seminggu sekali, kelompok terbimbing juga dilakukan oleh para guru apabila menghadapi permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam kegiatan belajar mengajar, hal ini dilakukan untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Selanjutnya materi-materi tersebut di buat kisi-

kisi dan soal, kemudian diujikan kepada siswa untuk mengevaluasi hasil belajar siswa yang dapat dijadikan panduan atau pegangan/tolak ukur keberhasilan kelompok belajarnya. Menurut Kepala Sekolah, kelompok bimbingan ini melibatkan semua guru, penjaga, orang tua, wali murid, komite sekolah khususnya untuk meningkatkan motivasi serta memberikan bimbingan pad siswa untuk menghindari pengaruh- pengaruh pergaulan sosial yang negatif.

Upaya ini membuat hasil yang menggembirakan, dilihat dari hasil perolehan hasil belajar dari tahun ke tahun, dengan demikian upaya agar dapat dikembangkan dan ditingkatkan dengan cara mencari model-model pembelajaran yang efektif dan efisien yang dapat menunjang proses kegiatan belajar mengajar.

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) adalah merupakan wadah pembinaan profesional dalam sistem gugus sekolah, diharapkan mampu mengadopsi strategi ini.

Pengamatan dan wawancara penulis dengan kepala sekolah memberikan gambaran bahwa kepala sekolah memahami kegiatan pembinaan kegiatan belajar mengajar itu sebagai upaya untuk memuaskan pelanggan, dan merupakan tugas utama dan tugas inti yang harus senantiasa mendapat penanganan secara profesional. Untuk mencapai status sekolah bermutu, perbaikan sekolah diusahakan dengan mengimplementasikan manajemen mutu pendidikan.

## B. Perencanaan dan Evaluasi.

Kepala sekolah merupakan manajer di sekolah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian perubahan atau perbaikan program pengajaran di sekolah.

Untuk menjamin efektivitas pengembangan kurikulum dan program pengajaran dalam MBS, menurut kepala sekolah langkah yang dilakukannya, bersama dengan guru-guru harus menjabarkan isi kurikulum secara lebih rinci dan operasional ke dalam program tahunan, semester dan bulanan. Adapun program mingguan atau program satuan pelajaran, wajib dikembangkan guru sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar. Berikut diperinci beberapa prinsip yang harus diperhatikan.

1. Tujuan yang dikehendaki harus jelas, makin operasional tujuan, makin mudah terlihat dan makin tepat program-program yang dikembangkan untuk dapat mencapai tujuan.
2. Program itu harus sederhana dan fleksibel.
3. Program-program yang disusun dan dikembangkan harus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Program yang dikembangkan harus menyeluruh dan harus jelas pencapaiannya.
5. Harus ada koordinasi antar komponen pelaksana program di sekolah. Untuk kepentingan status sekolah bermutu , langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Kepala SMP Negeri 1 Sorong dalam merencanakan program dan evaluasi yaitu

menilai kesesuaian program yang ada dengan tuntutan kebudayaan dan kebutuhan murid, meningkatkan perencanaan program, memilih dan melaksanakan program, serta menilai perubahan program.

### C. Pengelolaan Kurikulum.

Analisis bahan pelajaran dibuat oleh para guru mata pelajaran tiap minggu kemudian dilaporkan kepada kepala sekolah. Sedangkan penilaian terhadap pencapaian target penyampaian dilakukan secara normatif setiap satu minggu atau setelah satu pembahasan topik selesai.

Penanganan kegiatan belajar mengajar dan masalah - masalah yang ditimbulkannya merupakan tugas penting dari kepala sekolah. Oleh karena itu, pembinaan kegiatan belajar terdiri atas berbagai upaya yang dikerahkan dan dikoordinasikan oleh kepala sekolah untuk kelangsungan kegiatan belajar mengajar, sebagai kegiatan utama pendidikan di sekolah secara efektif dan efisien.

Ada beberapa tahap pengelolaan kurikulum yang dilakukan oleh kepala SMP Negeri 1 Sorong, yaitu tahap-tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi sebagaimana diperinci berikut ini :

#### 1. Tahap perencanaan.

Pada tahap ini kurikulum dijabarkan menjadi rencana pengajaran (RP). Kegiatan yang dilakukan meliputi, pertama penjabaran GBPP menjadi Analisis Mata Pelajaran (AMP), terutama mengkaji mana pokok bahasan/ sub pokok bahasan yang esensial atau biasanya sukar dipahami oleh siswa. Kedua, penentuan prioritas pokok bahasan yang kurang esensial atau mudah dipahami oleh siswa dapat dijadikan tugas/pekerjaan rumah, sedangkan pokok bahasan lainnya disajikan dalam kelas, latihan dan laboratorium. Ketiga, menyusun sekuen pembelajaran sesuai dengan kalender pendidikan.

#### 2. Tahap Pengorganisasian dan Koordinasi.

Pada tahap ini kepala sekolah mengatur pembagian tugas mengajar, penyusunan jadwal pelajaran dan jadwal kegiatan ekstrakurikuler melalui langkah-langkah kegiatan berikut ini. Pertama, membagi tugas mengajar dan tugas lain sesuai dengan keahlian dan minat guru. Guru-guru mempunyai tanggung jawabnya, terhadap mata pelajaran yang diampunya, sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan. Kedua, berusaha meratakan beban tugas untuk menumbuhkan rasa kebersamaan, hal ini dilakukan dengan harapan akan meningkatkan motivasi kerja guru. Kegiatan ekstrakurikuler difokuskan untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan kegiatan kurikuler dan kegiatan lain yang bersifat non akademik yang mengarah pada pembentukan keimanan/ketaqwaan, kepribadian dan kepemimpinan.

#### 3. Tahap Pelaksanaan.

Kepala Sekolah melakukan supervisi dengan tujuan untuk membantu guru menemukan dan mengatasi kesulitan yang dihadapi. Dengan demikian, guru merasa

didampingi pemimpin sehingga akan meningkatkan semangat kerjanya. Supervisi berpedoman pada prinsip-prinsip berikut ini. Pertama, pengawasan bersifat membimbing dan membantu mengatasi kesulitan dan bukan mencari kesalahan. Kedua, bantuan dan bimbingan diadakan secara tidak langsung, artinya diupayakan agar yang bersangkutan merasa mampu mengatasi sendiri, sedangkan Kepala Sekolah hanya membantu. Ketiga, balikan atau saran perlu segera diberikan, dengan maksud agar yang bersangkutan dapat memahami dengan jelas keterbatasan antara saran dan balikan tersebut dengan kondisi yang dihadapi. Keempat, pengawasan dilakukan secara periodik, artinya tidak menunggu sampai terjadi hambatan, kehadiran Kepala Sekolah akan menumbuhkan dukungan moral baik guru yang sedang melaksanakan tugas. Kelima, pengawasan dilakukan dalam suasana kemitraan dimaksudkan memberi kemudahan bagi guru meyampaikan hambatan yang dihadapi sehingga dapat segera dicari jalan keluarnya. Suasana kemitraan juga akan menumbuhkan hubungan kerja yang harmonis sehingga terciptanya tim kerja yang kompak.

#### 4. Tahap Evaluasi.

Tahap ini, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sorong berpedoman terhadap dua aspek berikut ini. Pertama, jenis evaluasi dikaitkan dengan tujuannya, dalam pengertian bahwa evaluasi memiliki tujuan ganda yaitu untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran khusus (TPK) dan mengetahui kesulitan siswa. Untuk mengatasi ketercapaian tujuan pembelajaran khusus guru dapat menggunakan berbagai alat penilaian yang sesuai, sedangkan mengetahui kesulitan siswa menggunakan diagnostik. Kedua, hasil evaluasi harus benar-benar dimanfaatkan guru untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran.

Pengamatan dan wawancara penulis dengan kepala sekolah memberikan gambaran bahwa kepala sekolah memahami kegiatan pembinaan kegiatan belajar mengajar itu sebagai upaya untuk memuaskan pelanggan, dan merupakan tugas utama dan tugas inti yang harus senantiasa mendapat penanganan secara profesional. Untuk mencapai status sekolah bermutu, perbaikan sekolah diusahakan dengan mengimplementasikan manajemen mutu pendidikan. Dalam konteks pendidikan maka manajemen mutu pendidikan mencakup orientasi komitmen manajemen terpadu, yang selalu mengutamakan pelanggan, komitmen tim keija, komitmen manajemen pribadi dan komitmen kepemimpinan. Perbaikan berkelanjutan, komitmen terhadap kepercayaan individu dan potensi tim, dan komitmen terhadap mutu. Dalam melaksanakan tugas tersebut, kepala sekolah juga melakukan penyesuaian program yang ditetapkan dalam kalender akademik dengan kebutuhan dan kegiatan sekolah. Kegiatan yang dimaksud ialah kegiatan intrakurikuler dan kegiatan ekstra kurikuler, meliputi kegiatan pramuka, UKS, dan Keterampilan untuk mengikuti lomba mata pelajaran.

#### D. Pengelolaan Ketenagaan

Organisasi SMP Negeri 1 Sorong, senantiasa menginginkan agar personil-personilnya melaksanakan tugas secara optimal dan menyumbangkan segenap kemampuan untuk kepentingan organisasi, serta bekerja lebih baik dari hari ke hari. Di samping itu kepala sekolah SMP Negerei 1 Sorong, sangat menyadari peningkatan kualitas guru-guru, sataf juga dirinya termasuk dalam menjalankan tugasnya. Sehubungan dengan itu, fungsi pembinaan dan pengembangan pegawai merupakan fungsi pengelolaan personil mutlak perlu, untuk memperbaiki, menjaga, dan meningkatkan kinerja pegawai. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara on the job training dan in service training. Kegiatan pembinaan dan pengembangan ini tidak hanya menyangkut apek kemampuan, tetapi juga menyangkut karier pegawai.

Setelah memperoleh data yang sesuai dengan kebutuhan, langkah selanjutnya menentukan calon pegawai yang akan diterima, kegiatan selanjutnya adalah mengusahakan supaya calon pegawai tersebut menjadi anggota organisasi yang sah sehingga mempunyai hak dan kewajiban sebagai anggota organisasi atau lembaga yaitu sebagai anggota Korpri dan PGRI. Aspek peningkatan profesionalisme, menurut Kepala SMP Negeri 1 Sorong, ditempuh dengan cara mengikutsertakan guru pada latihan yang sesuai, maupun melalui penyelenggaraan pelatihan di tempat (in house training).

Untuk pembinaan karir guru, kepala SMP Negeri 1 Sorong membantu, mendorong dan memfasilitasinya agar mereka dapat meningkatkan karirnya. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh kepala SMP Negeri 1 Sorong ialah sebagai berikut:

1. Meningkatkan prestasi guru dengan mengikuti pelatihan-pelatihan dan memotivasi untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
2. Membantu guru yang berprestasi untuk dipromosikan jabatan kepala sekolah. Peningkatan kesejahteraan mengandung arti material dan non material yang mengarah pada kepuasan kerja, sehubungan dengan itu, kepala SMP Negeri 1 Sorong dalam kedudukannya selaku pengelola tenaga kependidikan, berupaya meningkatkan kesejahteraan guru dengan berbagai cara. Pertama, memberikan secara tepat waktu dan tepat jumlah apa yang menjadi hak guru misalnya gaji honorarium, kelebihan mengajar, dan uang lembur. Kedua, memberikan penghargaan baik berupa materi maupun non materi bagi setiap guru yang berprestasi atau telah mengerjakan tugas dengan baik. Ketiga, membina hubungan kekeluargaan diantara para guru beserta keluarganya. Keempat, sesuai dengan kondisi yang ada dan aturan yang berlaku, mengupayakan sumber-sumber kesejahteraan guru dalam RAPBS. Kelima, memberikan kesempatan dan fasilitas agar setiap guru dapat mengaktualisasikan potensinya dengan cara memberikan kesempatan kepada guru untuk mengajukan dan membuktikan gagasan-gagasannya. Menurut kepala sekolah perilaku yang ditampilkan kepala sekolah dalam melakukan

pembinaan mencerminkan kriteria kepemimpinan yang ideal antara lain adanya kemauan dan kesediaan melaksanakan tugas. Dalam rangka pembinaan guru dan meningkatkan profesionalisme guru, menurut kepala sekolah dilakukan dengan mengikutsertakan guru-guru melalui penataran-penataran atau lokakarya-lokakarya yang diadakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan baik tingkat kabupaten maupun tingkat propinsi. Penataran-penataran ataupun lokakarya-lokakarya yang diikuti guru-guru terutama untuk meningkatkan profesionalisme, sehingga dampaknya dapat memotivasi kinerja guru dan meningkatkan kualitas ilmu yang dimiliki. Cara lain yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru disesuaikan dengan kemampuan guru dan situasi sekolah, serta kegiatan sekolah.

**E. Pengelolaan Fasilitas (Peralatan dan Perlengkapan).**

Fasilitas penting berupa ketersediaan buku-buku pelajaran, yang dapat menunjang pada kegiatan belajar mengajar. Menurut kepala sekolah sangat sulit rasanya dapat menerapkan materi pelajaran jika tidak ditunjang dengan alat pembelajaran yang memadai, sehingga siswa tergantung kepada guru yang mengajar di kelas, karena kelengkapan pengadaan bukan menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya mutu pendidikan dalam hal ini kepala sekolah tidak bisa diam, tetapi harus mencari solusi terbaik dalam pengadaan buku pelajaran sebagai sumber pengajaran.

Disamping sarana perpustakaan adalah sarana laboratorium IPA dan perlengkapannya yang bisa menunjang optimalisasi pencapaian tujuan pembelajaran. Menurut kepala SMP Negeri 1 Sorong fungsi laboratorium IPA yaitu : laboratorium menjadi tempat bagi guru dan siswa untuk mendalami konsep, mengembangkan metode pembelajaran, memperkaya pengetahuan dan keterampilan siswa, untuk belajar lebih memahami karakteristik alam dan lingkungan melalui optimalisasi keterampilan proses serta mengembangkan sikap ilmiah.

Tugas-tugas guru dalam kegiatan intrakurikuler dan harus mendapat pembinaan dari kepala sekolah ialah penanganan evaluasi belajar, penyediaan fasilitas mengajar, alat bantu, pengaturan ruang belajar, buku teks yang diperlukan serta fasilitas lain yang diperlukan.

**F. Pengelolaan Keuangan**

Sumber keuangan dan pembiayaan pada SMP Negeri 1 Sorong secara garis besar dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu (1) pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun kedua-duanya yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan; (2) orang tua atau peserta didik. Dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan, tanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan dana pendidikan masih tanggung jawab antara pemerintah, dan orang tua. Adapun dimensi pengeluaran SMP Negeri 1 Sorong

meliputi biaya rutin dan biaya pembangunan, tetapi dalam kenyataanya sumber dana dari masyarakat masih terbatas pada orang tua siswa.

Biaya rutin yang di keluarkan oleh SMP Negeri 1 Sorong adalah biaya, seperti gaji pegawai (guru dan non guru), serta biaya operasional, biaya pemeliharaan gedung fasilitas, dan alat-alat pengajaran (barang habis pakai). Sementara biaya pembangunan, misalnya, biaya pembelian, atau pengembangan tanah, pembangunan gedung, perbaikan atau rehab gedung, penambalan furnitur, serta biaya atau pengeluaran lain untuk barang-barang yang tidak habis pakai. Dalam rangka implementasi MBS SMP Negeri 1 Sorong, manajemen komponen keuangan selalu berusaha dilaksanakan dengan baik, transparan dan teliti mulai tahap penyusunan anggaran, penggunaan, sampai pengawasan dan pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar semua dana sekolah benar-benar dimanfaatkan secara efektif, efisien, tidak ada kebocoran-kebocoran serta bebas dari penyakit, korupsi, kolusi dan nepotisme.

Komponen utama manajemen keuangan di SMP Negeri 1 Sorong meliputi, (1) prosedur anggaran; (2) prosedur akuntansi keuangan; (3) pembelajaran pergudangan dan prosedur pendistribusian; (4) prosedur inventasi; dan (5) prosedur pemeriksaan.

#### G. Pelayanan Siswa

Keberhasilan, kemajuan, dan prestasi belajar para siswa di Manajemen kesiswaan atau menjajemen kemuridan (peserta didik) merupakan salah satu bidang operasional MBS. Keberhasilan, kemajuan, dan prestasi belajar para siswa di SMP Negeri 1 Sorong memerlukan data yang otentik yang tertuang di buku induk siswa, dapat dipercaya, dan memiliki keabsahan. Data ini diperlukan untuk mengetahui dan mengontrol keberhasilan atau prestasi kepala SMP Negeri 1 Sorong sebagai manajer pendidikan di sekolahnya. kemajuan para siswa ini secara periodik harus dilaporkan kepada orang tua (berupa buku raport), sebagai masukan untuk berpartisipasi dalam proses pendidikan.

Manajemen kesiswaan yang di lakukan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut bidang manajemen kesiswaan sedikitnya memiliki tiga tugas utama yang harus diperhatikan, yaitu penerimaan murid baru, kegiatan kemajuan belajar, serta bimbingan dan pembinaan disiplin.

#### H. Hubungan Sekolah dan Masyarakat

Kepala sekolah berusaha membina dan meningkatkan hubungan kerja sama yang baik antara sekolah dan masyarakat guna mewujudkan sekolah yang efektif dan efisien. Hubungan yang harmonis yang dilakukan kepala sekolah SMP Negeri 2 Sorong yaitu dengan cara :

1. Saling pengertian antara sekolah, orangtua,masyarakat, dan lembaga-

- lembaga lain yang ada di masyarakat;
2. Saling membantu antara sekolah dan masyarakat karena mengetahui manfaat, arti dan pentingnya peranan masing-masing;
  3. Kerjasama yang erat antara sekolah dengan berbagai pihak yang ada di masyarakat, misalnya sebelum kucuran dana dari pemerintah turun, biasanya yang dilakukan kepala sekolah SMP Negeri 1 Sorong mengadakan kerja sama antara orang tua siswa yang mampu.
- I. Pengelolaan Iklim Sekolah.
- Kepala sekolah mengelola organisasi sekolah sebagai bagian dari sistem sekolah terdiri dari gedung, tujuan, manajemen, kurikulum, fasilitas, peran guru dan murid. Keseluruhan komponen tersebut memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan, yaitu menjadi sekolah yang bermutu. Menurut kepala sekolah yang dilakukan dalam mewujudkan sekolah yang bermutu terkait dengan Pengelolaan Iklim Sekolah yaitu dengan cara :
- a. Penataan ruang belajar, ruang staf, ruang guru, ruang perpustakaan, ruang laboratorium hal ini untuk menciptakan suasana sekolah yang nyaman.
  - b. Setiap warga sekolah yang sakit, melahirkan dan mendapat musibah kepala sekolah dan perwakilan warga sekolah selalu berusaha berkunjung kerumah untuk berempati.
  - c. Kepala sekolah berusaha mengintensifkan dialog atau pertemuan secara rutin antara guru-guru dan staf baik didalam ruang (formal) maupun diluar ruang (non formal), biasanya dialog yang diungkapkan yaitu masalah kendala yang dihadapi dan kepala sekolah selalu berusaha memberikan jalan keluar, hal ini untuk mengantisipasi agar masalah tidak berlarut-larut.
  - d. Kepala sekolah SMP Negeri 1 Sorong membuka kotak saran, bagi warga sekolah (guru, siswa, orangtua, masyarakat), dan kepala sekolah berusaha untuk instropeksi diri, hal ini semata- mata untuk mewujudkan sekolah yang bermutu.

## KESIMPULAN

Dari keseluruhan deskripsi dan pembahasan hasil penelitian ini dapat ditarik beberapa simpulan tentang Kebijakan Kemampuan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sorong dalam implementasi MBPS, terkait dengan:

1. Proses Belajar Mengajar. Kepala sekolah SMP Negeri 1 Sorong memahami kegiatan belajar mengajar hal itu dilakukan sebagai upaya untuk memuaskan pelanggan, dan merupakan tugas utama dan tugas inti yang harus senantiasa mendapat penanganan secara profesional. Untuk mencapai status sekolah bermutu, perbaikan sekolah diusahakan dengan mengimplementasikan manajemen mutu pendidikan.

2. Perencanaan dan Evaluasi. Untuk kepentingan status sekolah bermutu, langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Kepala SMP Negeri 1 Sorong dalam merencanakan program dan evaluasi yaitu menilai kesesuaian program yang ada dengan tuntutan kebudayaan dan kebutuhan murid, meningkatkan perencanaan program, memilih dan melaksanakan program, serta menilai perubahan program.
3. Pengelolaan Kurikulum. Tahap pengelolaan kurikulum yang dilakukan oleh kepala SMP Negeri 1 Sorong, yaitu tahap-tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Dengan demikian pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Sekolah difokuskan kepada upaya mengatasi hambatan yang dihadapi oleh guru dan tidak semata-mata mencari kesalahan. Kedua, bantuan dan bimbingan diadakan secara tidak langsung, artinya diupayakan agar yang bersangkutan merasa mampu mengatasi sendiri, sedangkan Kepala Sekolah hanya membantu.
4. Pengelolaan Ketenagaan. Manajemen tenaga kependidikan atau manajemen personalia pendidikan bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun tetap dalam kondisi menyenangkan. Sehubungan dengan hal tersebut bahwa kepala SMP Negeri 1 Sorong kepala sekolah mengembangkan, menggaji, dan memotivasi personil guna mencapai tujuan sistem, membantu anggota mencapai posisi dan standar perilaku, memaksimalkan perkembangan karier tenaga kependidikan, serta menyelaraskan tujuan individu dan organisasi sesuai kontek MBS.
5. Pengelolaan Fasilitas (Peralatan dan Perlengkapan). Manajemen sarana dan prasarana yang dikelola oleh kepala SMP Negeri 1 Sorong telah dilaksanakan sesuai yang diharapkan hal ini bisa dilihat dari keadaan sekolah yang bersih, rapi, indah sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan baik bagi guru maupun murid untuk berada di sekolah. Disamping itu juga tersedianya fasilitas belajar yang memadai secara kuantitatif, kualitatif, dan relevan dengan kebutuhan serta dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan proses pendidikan dan pengajaran.
6. Pengelolaan Keuangan. Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut telah dilakukan oleh kepala SMP Negeri 1 Sorong dalam implementasi MBS, yang menuntut kemampuan kepala sekolah dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.
7. Pelayanan siswa. Manajemen kesiswaan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sorong adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah.

8. Hubungan Sekolah dan Masyarakat. Kepala SMP Negeri 1 Sorong senantiasa berusaha membina dan meningkatkan hubungan kerjasama yang baik antara sekolah dan masyarakat yang merupakan sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Dalam hal ini, sekolah sebagai sistem sosial merupakan bagian integral dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien.
9. Pengelolaan Iklim Sekolah.. Kepala sekolah SMP Negeri 1 Sorong telah melakukan hal-hal yang mendukung terwujudnya sekolah yang bermutu terkait dengan Pengelolaan Iklim Sekolah.

#### B. Rekomendasi

Di samping simpulan sebagaimana dikemukakan di atas, berikut ini diajukan pula rekomendasi kemampuan kepala sekolah, dalam peningkatan mutu pendidikan di SMPN 1 Sorong.

1. Bagi Sekolah, bertukar informasi dan pengalaman antara sekolah-sekolah yang tergolong lebih maju adalah suatu kegiatan yang sangat mungkin dilaksanakan. Sehubungan dengan kemungkinan tersebut, peningkatan kualitas kemampuan kepala sekolah SMPN 1 Kabupaten Sorong dapat dilakukan dengan cara menghimpun pengalaman dan informasi dari kepala-kepala sekolah di daerah lain yang dianggap lebih maju, terutama sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan MPBS. Untuk SMPN 1 Sorong dapat belajar dari keberhasilan SMP-SMP lain diluar kota Sorong, dan kota lain di sekitarnya yang sudah menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Melalui cara studi banding, misalnya guru-guru SMPN 1 Sorong dapat mempelajari kiat-kiat yang memungkinkan peningkatan mutu pendidikan.
2. Kepala Sekolah bekerjasama dengan komite Sekolah sebaiknya mengupayakan program-program pembinaan kemampuan guru. Hal ini dipandang perlu, mengingat sarana dan media pembinaan yang digunakan selama ini seperti MGMP lebih cenderung memenuhi formalitas saja, sedangkan substansinya peningkatan kinerja gurunya tidak mendapat sentuhan yang semestinya. Program tersebut dapat dilaksanakan dengan koordinasi antar sub rayon bersama MGMP. Narasumber dapat diambil dari daerah lain dan juga dapat kerja sama dengan perguruan tinggi terdekat.
3. Untuk lebih memotivasi pemberdayaan sekolah-sekolah sekolah menengah tingkat pertama, seperti SMPN 1 Kabupaten Sorong, maka kebijakan pemberian bantuan dari pemerintah hendaknya lebih didasarkan atas kemampuan prestasi sekolah yang bersangkutan. Bantuan-bantuan yang diberikan selama ini cenderung bersifat pemerataan dan diutamakan fisik gedung, sehingga pemanfaatannya pun dianggap tidak ada hubungan dengan keharusan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Bantuan sejenis itu memang akan

tetap penting bagi sekolah. Tetapi untuk masa depan hendaknya diimbangi pula dengan bentuk-bentuk bantuan yang bersifat memotivasi daya saing dan mutu Sekolah Menengah Tingkat Pertama.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Rachmadana, S. L. R. L. (2021). Youth Entrepreneurial Spirit In Family Business. *Journal of Business and Management Review*, 2(11), 772-784.
- Sallis E. (2005). *Total Quality Management in Education*. UK: Kogan Page. ([Total Quality Management in Education | PDF | Quality Management | Leadership \(scribd.com\)](#))
- Subaidi, (2020). Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan dan Kinerja Guru di MAN Pati, Jurnal Studi Manajemen Pendidikan, Vol. 4. No.2; November 2020. ([Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Dan Kinerja Guru Di MAN 1 Pati | PDF \(scribd.com\)](#))
- Umaedi, M.Ed. (1999). Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis sekolah, April 1999. ([Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah | PDF \(scribd.com\)](#))
- Uswatun Hasanah, dkk (2022). Pengembangan Profesionalisasi Guru untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di Pesantren Darul Quran Tembung, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Oktober, 8 (18), 615-623 ([Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan \(peneliti.net\)](#))